

SISTEM EKONOMI INDONESIA

INDONESIA, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan sumber daya alam, terus mengalami evolusi dalam sistem ekonominya sepanjang sejarahnya. Dari masa colonial hingga saat ini, perubahan dan adaptasi konstan telah membentuk landasan bagi sistem ekonomi Indonesia yang terus berkembang. Di tengah dinamika global dan tantangan internal, Indonesia telah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari restrukturisasi ekonomi hingga transformasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Buku ini membahas tentang Konsep Sistem Ekonomi Indonesia, Sistem Ekonomi Kapitalisme, Koperasi dalam Sistem Ekonomi Indonesia, BUMN dalam Sistem Ekonomi di Indonesia, Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Kerakyatan.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



Iskandar Chang, M.Si.
Heppi Syofya, S.E., M.Si.
Annisa Febryanti, S.IP.

SISTEM EKONOMI INDONESIA

SISTEM EKONOMI INDONESIA



SISTEM EKONOMI INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Iskandar Chang, M.Si. | Heppi Syofya, S.E., M.Si. | Annisa Febryanti, S.IP.

SISTEM EKONOMI INDONESIA



SISTEM EKONOMI INDONESIA

Penulis:

**Iskandar Chang, M.Si.
Heppi Syofya, S.E., M.Si.
Annisa Febryanti, S.IP.**

Editor:

Andi Asari, M.A.

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

vi, 110 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8543-33-5

Cetakan Pertama:

Januari 2024

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit.**

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

Kata Pengantar

SEGALA puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, atas, pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Sistem Ekonomi Indonesia. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Sistem Ekonomi Indonesia, Sistem Ekonomi Kapitalisme, Koperasi dalam Sistem Ekonomi Indonesia, BUMN dalam Sistem Ekonomi di Indonesia, Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Kerakyatan.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Pendahuluan	1
BAB 1 Konsep Sistem Ekonomi Indonesia	3
1.1 Definisi Sistem Ekonomi.....	3
1.2 Sistem Ekonomi Pasar	4
1.3 Sistem Ekonomi Komando	6
1.4 Sistem Ekonomi Campuran.....	8
1.5 Sistem Ekonomi Tradisional	10
1.6 Sistem Ekonomi Indonesia.....	12
BAB 2 Sistem Ekonomi Kapitalisme	21
2.1 Definisi Sistem Ekonomi Kapitalisme	21
2.2 Sejarah Pengembangan Kapitalisme di Indonesia	22
2.2 Peran Swasta dalam Sistem Kapitalis	23
2.3 Dampak Sosial dan Lingkungan Kapitalisme	25
2.3 Regulasi Pemerintah dalam Konteks Kapitalisme	26
2.4 Tantangan dan Peluang dalam Mengadopsi Sistem Ekonomi Kapitalis.....	28

2.5	Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Lainnya.....	30
BAB 3 Koperasi dalam Sistem Ekonomi Indonesia		35
3.1	Pengenalan Koperasi	35
3.2	Peran Koperasi dalam Sistem Ekonomi Indonesia	38
3.3	Prinsip-Prinsip Koperasi dan Implementasinya di Indonesia	40
3.4	Pengaturan dan Kebijakan Koperasi di Indonesia	42
3.5	Tantangan dan Peluang Koperasi di Indonesia	45
BAB 4 BUMN dalam Sistem Ekonomi di Indonesia.....		47
4.1	Pengenalan BUMN di Struktur Ekonomi	47
4.2	Pelayanan Publik.....	52
4.3	Pendorong Pembangunan Ekonomi.....	53
4.4	Pengelolaan Sumber Daya Alam	54
4.5	Stabilitas Keuangan	55
4.5	Penyedia Lapangan Kerja.....	56
BAB 5 Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia		59
5.1	Pengertian Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	59
5.2	Pentingnya Perencanaan Ekonomi	61
5.3	Proses Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	62
5.4	Syarat Kerberhasilan Suatu Perencanaan	63
5.5	Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia.....	64
BAB 6 Kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi		
Kerakyatan		73
6.1	Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	73
6.2	Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Rakyat	75
6.3	Pola Distribusi Pendapatan	76

6.4	Upaya Penguatan Sektor Pertanian dan Pedesaan	77
6.5	Pengaturan Sumber Daya Alam	79
6.6	Pendekatan Pembangunan Wilayah.....	80
6.7	Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen	81
6.8	Tantangan Kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Kerakyatan.....	83
BAB 7 Ekonomi Pancasila.....		85
7.1	Pilar Perwujudan Ekonomi Pancasila.....	85
7.2	Corak Ekonomi Pancasila	86
7.3	Operasionalisasi Ekonomi Pancasila	87
Kesimpulan		97
Daftar Pustaka		99
Biodata Penulis.....		107



Pendahuluan

INDONESIA, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan sumber daya alam, terus mengalami evolusi dalam sistem ekonominya sepanjang sejarahnya. Dari masa kolonial hingga saat ini, perubahan dan adaptasi konstan telah membentuk landasan bagi sistem ekonomi Indonesia yang terus berkembang. Di tengah dinamika global dan tantangan internal, Indonesia telah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari restrukturisasi ekonomi hingga transformasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Indonesia dengan keragaman budaya dan sumber daya alam terus mengalami evolusi sistem ekonominya. Sepanjang sejarahnya, dari masa kolonial hingga saat ini, perubahan dan adaptasi konstan telah membentuk landasan sistem ekonomi Indonesia. Ditengah perkembangan dinamika global dan tantangan internal, Indonesia telah mengalami perubahan struktur ekonomi, transformasi kebijakan, dan cara pandang untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Sistem ekonomi Indonesia mencerminkan perpaduan antara prinsip ekonomi pasar dan intervensi pemerintah. Dalam

beberapa dekade terakhir, negara ini telah berusaha memperkuat sektor-sektor utama, seperti pertanian, industri, dan jasa, sambil terus memperhatikan inklusi sosial dan distribusi yang lebih adil bagi masyarakatnya. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang menjadi fokus dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Buku ini akan mengeksplorasi evolusi sistem ekonomi Indonesia, melihat bagaimana kebijakan dan dinamika ekonomi telah membentuk identitas ekonomi negara ini, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB 1

Konsep Sistem Ekonomi Indonesia

1.1 Definisi Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah landasan yang mendasari bagaimana suatu masyarakat mengatur dan mengelola sumber daya ekonominya. Sistem ekonomi mencakup serangkaian aturan, kebijakan, dan struktur institusional yang membentuk cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di dalam suatu negara atau komunitas. Setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik uniknya sendiri, mempengaruhi bagaimana keputusan ekonomi diambil, sumber daya dialokasikan, dan kekayaan didistribusikan. Sistem ekonomi dapat berkisar dari ekonomi pasar yang menekankan mekanisme pasar dan inisiatif swasta, hingga ekonomi terencana yang memberikan peran dominan pada pemerintah dalam mengendalikan produksi dan distribusi. Di tengah-tengahnya, sistem ekonomi campuran mencoba menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan tersebut.

Tinjauan tentang sistem ekonomi membawa pemahaman mendalam tentang bagaimana suatu masyarakat menghadapi tantangan dan peluang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan yang adil, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman terhadap sistem ekonomi menjadi kunci untuk merinci kompleksitas hubungan antara pelaku ekonomi dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial mereka.

1.2 Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar adalah suatu kerangka ekonomi di mana keputusan produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Sistem ini bergantung pada interaksi individu dan perusahaan dalam pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien (Haddad & Hornuf, 2019). Berikut adalah beberapa ciri utama dari sistem ekonomi pasar:

1. **Kepemilikan Swasta**

Sistem ekonomi pasar umumnya didasarkan pada kepemilikan swasta atas sumber daya dan faktor produksi. Individu, perusahaan, dan entitas swasta memiliki hak untuk memiliki, mengendalikan, dan mentransaksikan properti dan faktor produksi (Polanyi, 2018).

2. **Mekanisme Pasar**

Keputusan ekonomi diambil melalui mekanisme pasar, di mana harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Harga yang muncul di pasar mencerminkan seimbang antara keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dan kemampuan produsen untuk menyediakannya.

3. Persaingan

Sistem ekonomi pasar mendorong persaingan yang sehat antara produsen. Persaingan ini mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk atau layanan.

4. Kebebasan Ekonomi dan Inisiatif Swasta

Individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri. Inisiatif swasta dihargai, dan pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk memilih jenis bisnis yang ingin mereka geluti (Polanyi, 2018).

5. Pasar Keuangan

Sistem ekonomi pasar juga melibatkan pasar keuangan di mana instrumen keuangan, seperti saham dan obligasi, diperdagangkan. Pasar ini memberikan akses ke modal bagi perusahaan dan memberikan peluang investasi kepada individu.

6. Fleksibilitas dan Penyesuaian Diri

Sistem ekonomi pasar bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar pasar. Ketika permintaan atau penawaran berubah, harga dan alokasi sumber daya akan menyesuaikan secara otomatis.

7. Konsumen sebagai Penggerak

Konsumen memiliki peran kunci dalam menentukan jenis dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan konsumen memberikan sinyal kepada produsen untuk menyesuaikan produksi mereka.

8. Pemerintahan Terbatas

Pemerintah terlibat dalam sistem ekonomi pasar, namun peranannya lebih terbatas dibandingkan dengan sistem ekonomi terencana. Pemerintah umumnya bertindak sebagai regulator untuk memastikan adanya persaingan

yang adil dan melibatkan diri dalam kebijakan makroekonomi.

9. Mobilitas Faktor Produksi

Faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan keterampilan, dapat berpindah antarindustri dan sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sistem ekonomi pasar tidak bersifat murni, dan sebagian besar negara di dunia mengadopsi bentuk campuran di mana pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengarahkan sektor-sektor tertentu. Sistem ini telah terbukti memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tetapi juga memerlukan regulasi untuk mencegah ketidaksetaraan dan dampak negatif lainnya. Sistem Ekonomi Pasar mengizinkan keputusan ekonomi diambil oleh pasar dan kekuatan penawaran dan permintaan. Pada sistem ini, faktor-faktor produksi, seperti tanah, modal, dan tenaga kerja, dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar.

1.3 Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando, juga dikenal sebagai ekonomi terencana atau sosialisme komando, adalah suatu kerangka ekonomi di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya ekonomi (Becker et al., 2017). Dalam sistem ini, keputusan-keputusan ekonomi sentral diambil oleh pemerintah atau entitas terpusat yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa ciri utama dari sistem ekonomi komando:

1. Kepemilikan Publik

Sebagian besar sumber daya dan faktor produksi, termasuk tanah, tenaga kerja, dan modal, dimiliki oleh negara atau entitas publik. Pemilikannya sering kali dilakukan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah.

2. **Perencanaan Pusat**
Keputusan ekonomi diambil secara sentral oleh pemerintah atau lembaga perencana pusat. Perencanaan ini mencakup penentuan alokasi sumber daya, produksi barang dan jasa, serta penetapan harga.
3. **Pembatasan Inisiatif Swasta**
Inisiatif swasta dibatasi atau bahkan dilarang dalam beberapa aspek ekonomi. Pemerintah memiliki kendali penuh atas kebijakan produksi dan distribusi, dan partisipasi swasta sering kali terbatas pada sektor-sektor tertentu yang diizinkan.
4. **Ketidakterbukaan Pasar**
Mekanisme pasar tidak memainkan peran utama dalam menentukan harga atau alokasi sumber daya. Sebaliknya, pemerintah menetapkan harga-harga, jumlah produksi, dan distribusi barang dan jasa.
5. **Ketidakterbukaan yang Rendah (Idealnya)**
Salah satu tujuan sistem ekonomi komando adalah mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Namun, implementasinya tidak selalu mencapai tujuan ini (Constantino, 2018).
6. **Keterbatasan Pasar Keuangan**
Pasar keuangan dalam sistem ekonomi komando sering kali memiliki keterbatasan karena peran besar pemerintah dalam mengontrol sumber daya dan investasi.
7. **Pekerjaan dan Ketenagakerjaan yang Terkendali**
Pemerintah juga memiliki kontrol atas penentuan jenis pekerjaan dan alokasi tenaga kerja. Keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan ekonomi mungkin terbatas.

8. Tujuan Sosial dan Politik yang Mendorong

Sistem ekonomi komando sering kali diarahkan oleh tujuan-tujuan sosial dan politik, seperti pencapaian kesetaraan sosial, peningkatan tingkat pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

Beberapa negara yang terkenal menganut sistem ekonomi komando adalah Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur selama Perang Dingin. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak negara yang awalnya menganut sistem ini beralih menuju model ekonomi campuran atau ekonomi pasar seiring dengan mengakui keterbatasan dan tantangan sistem ekonomi komando.

1.4 Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi dari elemen-elemen sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam konteks sistem ekonomi campuran, terdapat campuran antara pasar bebas yang mengandalkan mekanisme pasar dan inisiatif swasta dengan intervensi pemerintah yang mengarah pada regulasi dan distribusi sumber daya (Constantino, 2018). Sistem ini mencoba memanfaatkan kelebihan keduanya, menciptakan suatu model yang diharapkan dapat menggabungkan efisiensi pasar dengan pertimbangan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Berikut adalah beberapa karakteristik dari sistem ekonomi campuran:

1. Kepemilikan Campuran

Sumber daya dan faktor produksi dapat dimiliki baik oleh sektor swasta maupun oleh pemerintah. Beberapa sektor, terutama yang dianggap strategis atau vital, mungkin dimiliki oleh pemerintah, sementara sektor-sektor lainnya dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta.

2. Pasar dan Harga Ditentukan oleh Permintaan dan Penawaran

Pasar masih memainkan peran penting dalam menentukan harga barang dan jasa. Mekanisme pasaran memungkinkan interaksi antara permintaan dan penawaran untuk menetapkan harga secara relatif.

3. Regulasi Pemerintah

Pemerintah terlibat dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang memastikan adanya persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini mencakup regulasi harga, standar kualitas, dan perlindungan konsumen.

4. Intervensi Pemerintah dalam Distribusi Kekayaan

Pemerintah dapat terlibat dalam redistribusi kekayaan melalui kebijakan pajak progresif, program kesejahteraan, dan upaya-upaya lain untuk mengurangi ketidakesetaraan ekonomi.

5. Tujuan Sosial dan Ekonomi

Sistem ekonomi campuran mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial sekaligus. Tujuan ini dapat mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Lundvall, 2016).

6. Kebebasan Ekonomi dan Swasta

Individu dan perusahaan masih memiliki kebebasan untuk berusaha dan berinvestasi. Swasta tetap berperan dalam kegiatan ekonomi, termasuk berpartisipasi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa.

7. Pendidikan dan Kesehatan Umum

Pemerintah dapat memiliki peran aktif dalam penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan untuk memastikan

akses yang lebih merata dan meningkatkan kapasitas manusia.

8. Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel

Pasar tenaga kerja dapat bersifat fleksibel, di mana hubungan antara pekerja dan pengusaha dapat ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah juga dapat melibatkan diri dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kondisi kerja yang layak.

1.5 Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang didasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan norma-norma sosial yang telah berlangsung turun-temurun di suatu masyarakat. Di dalam sistem ini, keputusan ekonomi dan alokasi sumber daya tidak ditentukan oleh mekanisme pasar, pemerintah, atau perusahaan swasta, tetapi lebih bergantung pada praktik-praktik yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat tersebut selama bertahun-tahun (Milonakis & Fine, 2008). Berikut adalah beberapa ciri utama dari sistem ekonomi tradisional:

1. Kepemilikan Bersama

Sumber daya dan faktor produksi sering kali dimiliki bersama oleh komunitas atau kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat. Konsep kepemilikan individual mungkin kurang dominan dibandingkan dengan kepentingan bersama.

2. Pembagian Tenaga Kerja Berdasarkan Tradisi

Pekerjaan dan peran dalam masyarakat ditentukan oleh tradisi dan kebiasaan. Misalnya, keahlian tertentu atau jenis pekerjaan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. **Produksi Berdasarkan Kebutuhan**
Produksi barang dan jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Tidak ada dorongan untuk memaksimalkan profit atau meningkatkan efisiensi produksi seperti dalam sistem ekonomi pasar.
4. **Peran Gender yang Terspesialisasi**
Sering kali, sistem ekonomi tradisional mencerminkan peran gender yang terspesialisasi, di mana pria dan wanita memiliki peran tertentu dalam kegiatan ekonomi berdasarkan norma-norma budaya.
5. **Distribusi Kekayaan yang Adat**
Distribusi kekayaan didasarkan pada aturan dan norma-norma adat. Sering kali, konsep kepemilikan pribadi tidak sekuat dalam sistem ekonomi pasar.
6. **Siklus Hidup Berbasis Tradisi**
Siklus hidup, termasuk pernikahan, kelahiran, dan kematian, sering kali diatur oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat.
7. **Harga Ditentukan oleh Nilai Tradisional**
Tidak seperti dalam sistem ekonomi pasar, di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar, dalam sistem ekonomi tradisional harga sering kali ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma sosial.
8. **Sistem Barter dan Pertukaran**
Sering kali, pertukaran barang dan jasa dilakukan melalui sistem barter, di mana barang atau jasa satu kelompok diperdagangkan dengan barang atau jasa kelompok lainnya.

1.6 Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia adalah campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Indonesia mengadopsi sistem ekonomi campuran untuk mencapai keseimbangan antara pasar bebas dan intervensi pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan ekonomi (Puja Pangestu et al., 2021). Sejak krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi ekonomi yang signifikan, termasuk dalam hal liberalisasi sektor-sektor tertentu dan peningkatan iklim investasi.

1.6.1 Sistem Ekonomi Orde Lama

Sistem ekonomi Orde Lama (1945-1967) merupakan periode di mana Indonesia mengalami perubahan politik dan ekonomi setelah kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda (I. D. Kurniawan & Lahir, 2017). Beberapa karakteristik sistem ekonomi Orde Lama meliputi:

1. Pemerintah yang langsung terlibat dan mengatur perekonomian, dengan fokus utama pada sektor public
2. Pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan
3. Pengembangan ekonomi nasional dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Nasionalisasi perusahaan dan pembangunan ekonomi lokal

Meskipun sistem ekonomi Orde Lama menghadapi ketidakpastian dalam memperkembangkan ekonomi Indonesia, seperti ketimpangan ekonomi dan krisis moneter, pada akhirnya, sistem ini menjadi peralihan utama dalam mengatur ekonomi Indonesia hingga tahun 1967

1.6.2 Sistem Ekonomi Orde Baru

Sistem ekonomi Orde Baru adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang untuk memulihkan krisis ekonomi yang terjadi di awal pemerintahan (Habib, 2021). Sistem ekonomi Orde Baru didasarkan pada konsep "sistem ekonomi terpimpin" yang menempatkan negara sebagai pengatur utama dalam perekonomian nasional. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru antara lain Repelita, Trilogi Pembangunan, dan 8 Jalur Pemerataan Ekonomi. Meskipun berhasil keluar dari krisis dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, sistem ekonomi Orde Baru juga menimbulkan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pada akhirnya, krisis ekonomi pada tahun 1998 menjadi penyebab runtuhnya rezim Orde Baru.

Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun):

Repelita adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun, sebuah konsep perencanaan pembangunan ekonomi yang dijalankan dalam rentang waktu lima tahun. Repelita merupakan instrumen perencanaan strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam jangka waktu yang terukur.

Repelita pertama Kali Diterapkan (1969): Repelita pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1969. Repelita ini dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Penerapan Repelita bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang terukur dan fokus. Setiap Repelita memiliki periode pelaksanaan selama lima tahun. Setiap lima tahun, pemerintah menyusun rencana pembangunan yang mencakup sektor ekonomi, sosial, dan politik

dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan.

Dalam setiap Repelita, ditetapkan berbagai target pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta berbagai aspek lainnya. Setiap sektor memiliki target khusus yang harus dicapai selama periode lima tahun tersebut. Repelita menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengarahkan investasi baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Pengalokasian sumber daya dan investasi yang strategis diarahkan sesuai dengan prioritas dan target yang telah ditetapkan dalam Repelita. Pada akhir setiap periode lima tahun, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target pembangunan.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menyusun Repelita berikutnya. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perubahan kondisi, Repelita dapat direvisi agar tetap relevan dengan keadaan aktual. Melalui konsep Repelita, pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terencana dan terukur. Meskipun Repelita memberikan arah pembangunan yang jangka menengah, namun keberhasilannya tergantung pada implementasi yang baik, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

Trilogi Pembangunan

Trilogi Pembangunan adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang diadopsi oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Konsep ini mengedepankan tiga pilar utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang Trilogi Pembangunan:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi:

Tujuan: Menciptakan kondisi di mana ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi: Pemerintah fokus pada kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, liberalisasi ekonomi, dan promosi investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Stabilitas Politik dan Keamanan:

Tujuan: Menciptakan lingkungan politik yang stabil dan aman untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan. Stabilitas politik dianggap sebagai syarat penting agar investor merasa aman dan nyaman.

Implementasi: Pemerintah menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan dengan mengontrol dan mengatasi potensi konflik serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pembangunan.

3. Pemerataan Pembangunan:

Tujuan: Mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Pemerataan dianggap sebagai upaya untuk mencegah akumulasi pembangunan hanya terfokus di daerah-daerah tertentu.

Implementasi: Melalui program-program seperti transmigrasi, pengembangan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, dan alokasi anggaran pembangunan yang merata untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

Trilogi Pembangunan menjadi landasan utama kebijakan pemerintah Orde Baru dalam merancang dan melaksanakan

program pembangunan. Meskipun konsep ini berhasil mencapai beberapa pencapaian, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada beberapa periode, stabilitas politik yang relatif terjaga, dan sejumlah upaya pemerataan pembangunan, namun juga mendapat kritik terutama terkait dengan isu hak asasi manusia, korupsi, dan ketidaksetaraan sosial. Sejak reformasi pada akhir tahun 1990-an, berbagai konsep dan strategi pembangunan yang berbeda telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif.

8 Jalur Pemerataan Ekonomi

8 Jalur Pemerataan Ekonomi merupakan inisiatif pemerintah Indonesia pada era Orde Baru untuk mengatasi ketidaksetaraan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Program ini diperkenalkan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi ke daerah-daerah yang masih tertinggal agar hasil pembangunan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang konsep 8 Jalur Pemerataan Ekonomi:

1. Jalur Industri

Tujuan: Pengembangan sektor industri di luar Jawa untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendiversifikasi struktur ekonomi.

Implementasi: Pendirian pusat-pusat industri dan pabrik di daerah-daerah tertinggal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Jalur Pertanian

Tujuan: Meningkatkan produktivitas sektor pertanian di luar Jawa, termasuk pengembangan sistem irigasi, penyediaan sarana produksi, dan peningkatan kualitas tanah.

Implementasi: Pemberian dukungan kepada petani melalui program-program bantuan teknis, permodalan, dan pengembangan infrastruktur pertanian.

3. Jalur Pendidikan

Tujuan: Menyediakan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah terpencil.

Implementasi: Pembangunan sekolah, penyediaan beasiswa, dan program-program peningkatan kualitas guru di daerah-daerah terpencil.

4. Jalur Kesehatan

Tujuan: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kesehatan masyarakat di luar Jawa.

Implementasi: Pembangunan puskesmas, pelatihan tenaga kesehatan, dan penyediaan fasilitas kesehatan dasar di daerah-daerah tertinggal.

5. Jalur Perkebunan

Tujuan: Mengembangkan sektor perkebunan di luar Jawa, seperti kelapa sawit, karet, dan lainnya, untuk meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan lapangan kerja.

Implementasi: Pemberian dukungan teknis, permodalan, dan pengembangan infrastruktur perkebunan di daerah-daerah tertentu.

6. Jalur Pariwisata

Tujuan: Mengembangkan potensi pariwisata di luar Jawa untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata.

Implementasi: Pembangunan sarana pariwisata, promosi destinasi wisata, dan pelatihan sumber daya manusia di sektor pariwisata.

7. Jalur Transmigrasi

Tujuan: Mendorong transmigrasi penduduk dari Pulau Jawa ke daerah-daerah yang masih jarang dihuni untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa.

Implementasi: Program transmigrasi dengan menyediakan fasilitas pendukung, seperti perumahan, perkebunan, dan infrastruktur pendukung lainnya di daerah tujuan.

8. Jalur Transmigrasi Industri:

Tujuan: Menciptakan kawasan industri baru di luar Jawa melalui program transmigrasi industri untuk meratakan pembangunan industri di seluruh Indonesia.

Implementasi: Pemindahan sebagian industri dari Jawa ke luar Jawa dan pembangunan kawasan industri baru di daerah-daerah tertentu.

Melalui implementasi 8 Jalur Pemerataan Ekonomi, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata di seluruh nusantara dan mengurangi disparitas antara Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya. Program ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di luar Jawa melalui langkah-langkah strategis, seperti pengembangan industri dan pertanian, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur. Dengan mengejar pemerataan di berbagai sektor, pemerintah bertujuan memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya terakumulasi di wilayah tertentu, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati manfaatnya secara merata. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat integrasi dan kesatuan pembangunan di seluruh negeri.

1.6.3 Sistem Ekonomi Era Reformasi

Sistem ekonomi Era Reformasi (1998-2004) merupakan periode di mana Indonesia mengalami reformasi ekonomi yang lebih inklusif dan demokratis setelah krisis moneter 1997/1998. Beberapa karakteristik sistem ekonomi Era Reformasi meliputi:

1. Pemulihan ekonomi dari krisis moneter 1997/1998, yang menjadi impetus untuk reformasi ekonomi yang lebih inklusif dan demokratis.
2. Penghapusan monopoli pada sektor-sektor tertentu, seperti energi dan telekomunikasi, untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi sektor-sektor tersebut, serta memperkuat perlindungan konsumen.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong investasi pada sektor-sektor yang kurang berkembang, seperti pariwisata, pertanian, dan kreatif.
4. Perubahan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mencakup kebijakan moneter, fiskal, korporasi, dan perbankan.
5. Peningkatan pendapatan melalui pajak, cukai, dan mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah.

Sistem ekonomi Era Reformasi menghasilkan pertumbuhan sektor swasta yang lebih kuat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi (Styaningrum, 2021). Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam sektor ekonomi, seperti ketimpangan ekonomi yang masih cukup tinggi, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.



Statistics

Day Week Month Year
February March **April** May

Total Balance
\$20,000

Income
\$2,200

Expense
\$1,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BAB 2

Sistem Ekonomi Kapitalisme

2.1 Definisi Sistem Ekonomi Kapitalisme

Sistem Ekonomi Kapitalisme adalah paradigma ekonomi yang menandai kepemilikan dan pengoperasian faktor produksi utama, termasuk tanah, modal, dan tenaga kerja, oleh sektor swasta (Friedman, 1962). Dalam kerangka kapitalisme, mekanisme pasar memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan ekonomi, diatur oleh prinsip-prinsip hukum penawaran dan permintaan. Esensi kapitalisme terletak pada pencapaian keuntungan melalui persaingan pasar dan inisiatif swasta, memberikan kebebasan kepada perusahaan dan individu untuk mengejar laba sejalan dengan keberanian untuk mengambil risiko.

Pentingnya pasar bebas dalam konteks kapitalisme menonjolkan efisiensi mekanisme pasar, di mana harga dan alokasi sumber daya ditentukan oleh interaksi kekuatan pasar tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah. Sifat inovatif

kapitalisme menjadi ciri khasnya, di mana persaingan antar perusahaan mendorong terciptanya inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing.

Meskipun pemerintah masih memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi, tren utama dalam kapitalisme menunjukkan kecenderungan memberikan ruang lebih besar bagi inisiatif swasta dan mekanisme pasar untuk mengatur dinamika ekonomi. Namun, keberlanjutan kapitalisme menjadi subyek pertanyaan terkait dampak sosial dan lingkungan. Kritik terhadap sistem ini menyoroti potensi ketidaksetaraan ekonomi dan dampak negatif terhadap lingkungan alam.

Dalam prakteknya, banyak negara yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme dihadapkan pada tuntutan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kesimpulannya, Sistem Ekonomi Kapitalisme menciptakan lingkungan yang mempromosikan inovasi, efisiensi, dan kebebasan individu sebagai pilar utamanya. Namun, untuk memastikan kesinambungan, kapitalisme harus dikelola dengan bijak untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan, menjadikan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama.

2.2 Sejarah Pengembangan Kapitalisme di Indonesia

Sejarah perkembangan kapitalisme di Indonesia mengalami perjalanan yang kompleks, terkait erat dengan periode kolonial dan dinamika ekonomi global. Pada awal abad ke-17, VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) Belanda menjalankan praktik kolonialisme di Indonesia, membawa serta konsep kapitalisme yang menfokuskan pada eksploitasi sumber daya alam, khususnya rempah-rempah. Sistem tanam paksa dan monopoli perdagangan VOC membentuk dasar kapitalisme di Indonesia, yang terkait erat dengan permintaan pasar Eropa (Widodo, 2006).

Selama masa penjajahan Jepang selama Perang Dunia II, Indonesia mengalami transformasi ekonomi yang signifikan. Jepang menggantikan sistem tanam paksa dengan model ekonomi kapitalis yang melibatkan perusahaan swasta. Meskipun periode ini relatif singkat, dampaknya tetap meninggalkan jejak pada perkembangan ekonomi pasca-kemerdekaan.

Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia berusaha membentuk sistem ekonomi yang lebih mandiri. Proses nasionalisasi melibatkan pengambilalihan perusahaan asing oleh pemerintah, membentuk fondasi bagi kapitalisme yang lebih nasional. Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis pasar dengan melibatkan sektor swasta, memperkuat pengaruh kapitalisme dalam pembangunan ekonomi nasional.

Setelah mengalami krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, Indonesia meneruskan reformasi ekonomi dengan lebih terlibat dalam ekonomi global. Keterbukaan ekonomi ditingkatkan, dan sektor swasta semakin menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan isu lingkungan mulai menarik perhatian, memicu perdebatan tentang bagaimana kapitalisme dapat dikelola secara berkelanjutan di masa depan.

2.2 Peran Swasta dalam Sistem Kapitalis

Peran sektor swasta dalam sistem ekonomi kapitalis melibatkan sejumlah fungsi kunci yang secara esensial mendukung dinamika pasar dan pertumbuhan ekonomi. Aspek-aspek kunci ini melibatkan interaksi kompleks antara perusahaan swasta, pasar keuangan, dan tenaga kerja dalam mencapai tujuan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi (David & David, 2017). Berikut adalah pemerpanjangan dan penjelasan lebih rinci terkait peran swasta dalam konteks kapitalisme:

1. **Inovasi dan Pengembangan:** Sebagai katalis inovasi, perusahaan swasta bukan hanya menjadi pesaing pasar tetapi juga pemain kunci dalam mendorong penelitian dan pengembangan. Dorongan untuk mencapai keuntungan menghasilkan persaingan sehat antara perusahaan, memicu upaya inovatif untuk menciptakan produk, teknologi, dan layanan baru. Ini memberikan kontribusi signifikan pada dinamika kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi.
2. **Penciptaan Lapangan Kerja:** Sektor swasta tidak hanya menyediakan lapangan kerja secara substansial tetapi juga membentuk kerangka dasar hubungan antara majikan dan karyawan dalam konteks kapitalisme. Pekerjaan yang diciptakan oleh perusahaan swasta tidak hanya mendukung keberlangsungan operasional mereka tetapi juga memberikan kontribusi positif pada tingkat pengangguran dalam masyarakat.
3. **Pembiayaan Investasi:** Peran swasta dalam menyediakan modal melalui pasar keuangan dan investor swasta memainkan peran integral dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana dari pasar keuangan memungkinkan mereka untuk memulai atau memperluas operasi mereka, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dinamis.
4. **Pertumbuhan Ekonomi:** Perusahaan swasta berfungsi sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi melalui dorongan untuk mencapai keuntungan. Upaya untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas mendorong peningkatan output ekonomi secara keseluruhan. Partisipasi aktif perusahaan swasta dalam pasar memberikan kontribusi pada peningkatan PDB dan kemajuan ekonomi nasional.

5. **Fleksibilitas dan Responsif Terhadap Pasar:** Fleksibilitas perusahaan swasta memainkan peran kunci dalam menjaga ketanggapan terhadap perubahan pasar dan dinamika konsumen. Kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan strategi bisnis mereka, mengikuti tren pasar, dan merespons perubahan kebutuhan konsumen memberikan keunggulan kompetitif yang vital dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat.

2.3 Dampak Sosial dan Lingkungan Kapitalisme

Dalam perspektif kapitalisme, dampak sosial dan lingkungan muncul sebagai fenomena kompleks dan multidimensional yang memerlukan pemahaman yang mendalam. Meskipun kapitalisme telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tidak dapat diabaikan bahwa dampak negatifnya terhadap aspek sosial dan lingkungan juga memerlukan perhatian yang serius (Jackson, 2009).

1. **Ketidaksetaraan Sosial:** Salah satu dampak sosial kapitalisme yang menjadi perdebatan adalah peningkatan ketidaksetaraan ekonomi. Fokus utama pada pencapaian keuntungan dapat menghasilkan kesenjangan pendapatan yang substansial, yang menciptakan divisi antara berbagai kelas sosial. Peningkatan ketidaksetaraan ini dapat mengakibatkan masalah sosial, seperti ketidaksetaraan dalam pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan.
2. **Kesejahteraan Pekerja:** Meskipun kapitalisme memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi, perhatian terhadap kondisi kerja dan hak pekerja menjadi sorotan. Tekanan untuk memaksimalkan keuntungan dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja, kurangnya keamanan pekerjaan, dan pengurangan manfaat sosial. Dampak negatif ini dapat merugikan kesejahteraan dan kebahagiaan pekerja.

3. **Krisis Lingkungan:** Model ekonomi kapitalis sering kali mengorbankan keberlanjutan lingkungan demi pencapaian tujuan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam, polusi, dan dampak perubahan iklim adalah konsekuensi yang sering kali terkait dengan praktik bisnis kapitalis yang tidak terkendali. Keberlanjutan lingkungan mungkin diabaikan demi pencapaian target keuangan yang lebih cepat.
4. **Konsumisme Berlebihan:** Kapitalisme sering dikaitkan dengan budaya konsumsi berlebihan. Dorongan untuk mencapai keuntungan maksimal dapat merangsang promosi konsumsi berlebihan dan pemborosan sumber daya. Dampaknya tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga menyumbang pada ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya global.
5. **Krisis Kesehatan Mental:** Tekanan untuk mencapai kesuksesan ekonomi dalam lingkungan kapitalis dapat memberikan tekanan yang signifikan pada individu. Persaingan yang ketat dan tuntutan untuk terus meningkatkan hasil keuangan dapat berkontribusi pada munculnya masalah kesehatan mental seperti stres, kelelahan, dan kecemasan.

2.3 Regulasi Pemerintah dalam Konteks Kapitalisme

Regulasi pemerintah dalam konteks kapitalisme berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan perlindungan kepentingan publik. Berbagai aspek regulasi pemerintah mencakup beragam dimensi untuk memastikan bahwa dinamika pasar berjalan efisien dan adil (Stiglitz, 2010). Berikut adalah pemperpanjang dan penjelasan lebih rinci terkait aspek-aspek utama regulasi pemerintah dalam sistem kapitalis:

1. **Perlindungan Konsumen:** Pemerintah memainkan peran sentral dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Regulasi konsumen melibatkan penetapan standar keamanan produk, pemberian informasi yang akurat kepada konsumen, dan pengakuan hak konsumen untuk menghindari praktik penipuan atau penjualan yang merugikan. Melalui badan pengawas dan peraturan, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan di mana konsumen dapat berinteraksi dengan pasar secara aman dan terinformasi.
2. **Persaingan yang Adil:** Untuk mencegah monopoli dan memastikan persaingan yang adil, pemerintah melakukan regulasi industri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada praktik bisnis yang menghambat pesaing atau menciptakan pasar yang tidak efisien. Pembentukan badan antimonopoli dan regulasi persaingan membantu menciptakan iklim bisnis yang sehat dan memberikan peluang yang setara bagi semua pemangku kepentingan.
3. **Pengaturan Lingkungan:** Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatur dampak industri terhadap lingkungan. Ini mencakup pengaturan terkait emisi polutan, pengelolaan limbah, dan pelestarian sumber daya alam. Regulasi lingkungan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, memastikan bahwa praktik bisnis tidak merugikan lingkungan.
4. **Pengaturan Keuangan:** Pemerintah dapat mengatur sektor keuangan untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi, melibatkan pengawasan terhadap praktik keuangan yang merugikan dan mengelola risiko sistemik. Pembentukan badan pengawas keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat.

5. **Pendidikan dan Pelatihan:** Pemerintah memiliki peran strategis dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Ini mencakup program pendidikan yang mendukung inovasi dan teknologi baru, serta pelatihan untuk mengatasi ketidakcocokan keterampilan di pasar tenaga kerja. Keterlibatan pemerintah dalam memperkuat kualifikasi tenaga kerja menjadi aspek vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
6. **Kesejahteraan Sosial:** Pemerintah dapat menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial untuk meredakan dampak ketidaksetaraan yang mungkin timbul dari sistem kapitalis. Program-program seperti bantuan keuangan, tunjangan pengangguran, dan layanan kesehatan universal menjadi instrumen penting untuk mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.4 Tantangan dan Peluang dalam Mengadopsi Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis, dengan dasar prinsip inisiatif swasta, persaingan pasar, dan pencapaian keuntungan, membawa bersamaan tantangan dan peluang yang perlu dipahami secara mendalam (Micklethwait & Wooldridge, 2003).

Tantangan:

1. **Ketidaksetaraan Ekonomi:** Salah satu tantangan utama dalam mengadopsi sistem ekonomi kapitalis adalah meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi. Fokus pada keuntungan individu dan perusahaan dapat mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang signifikan, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang.

2. **Dampak Lingkungan yang Negatif:** Sistem kapitalis, terutama jika tidak diatur dengan baik, dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Dorongan untuk mencapai keuntungan dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, polusi, dan perubahan iklim, membawa tantangan serius terhadap keberlanjutan lingkungan.
3. **Krisis Keuangan dan Ketidakstabilan Ekonomi:** Kapitalisme cenderung menyertai risiko keuangan dan ketidakstabilan ekonomi. Krisis keuangan dapat timbul dari spekulasi berlebihan, perubahan pasar global, atau kelalaian pengawasan, menciptakan tantangan serius bagi stabilitas ekonomi nasional dan global.
4. **Tantangan Kesejahteraan Sosial:** Sistem kapitalis dapat menimbulkan tantangan terhadap kesejahteraan sosial, terutama jika tidak ada sistem perlindungan yang memadai. Kurangnya akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dapat menciptakan ketidaksetaraan dan menghambat pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Peluang:

1. **Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi:** Sistem kapitalis dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dorongan untuk mencapai keuntungan mendorong perusahaan untuk berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan efisiensi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
2. **Kebebasan Individu dan Kewirausahaan:** Kapitalisme memberikan kebebasan individu untuk mengejar peluang bisnis dan kewirausahaan. Ini menciptakan masyarakat yang dinamis di mana individu dapat mengambil risiko untuk mencapai keberhasilan finansial dan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian.

3. **Pengentasan Kemiskinan:** Meskipun kapitalisme dapat menyebabkan ketidaksetaraan, namun juga dapat memberikan peluang untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan standar hidup bagi sebagian besar masyarakat.
4. **Responsif terhadap Perubahan:** Sistem kapitalis secara alamiah responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Ini memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap tren baru, teknologi, dan perubahan lingkungan global.

2.5 Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Lainnya

Perbandingan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi lainnya mengungkap perbedaan fundamental dalam cara sumber daya dialokasikan, kepemilikan faktor produksi, dan peran pemerintah (Samuelson & Nordhaus, 2010). Dua sistem ekonomi yang sering dibandingkan dengan kapitalisme adalah sosialisme dan ekonomi campuran.

1. Kapitalisme vs. Sosialisme:

- **Kepemilikan Faktor Produksi:** Dalam sistem kapitalis, kepemilikan swasta terhadap faktor produksi memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Ini memicu persaingan sehat di pasar, yang diharapkan akan menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, sosialisme mengejar kepemilikan kolektif atau negara atas faktor produksi untuk mengeliminasi ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh kepemilikan swasta. Tujuannya adalah menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata di antara masyarakat.

- **Pengambilan Keputusan Ekonomi:** Kapitalisme mengandalkan mekanisme pasar yang ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan. Keputusan ekonomi dibuat oleh individu dan perusahaan yang merespons kebutuhan dan keinginan pasar. Sosialisme, di sisi lain, mengadopsi perencanaan sentral di mana pemerintah memiliki peran dominan dalam mengatur produksi dan mengarahkan alokasi sumber daya. Ini bertujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan dan mencapai kontrol kolektif atas ekonomi.
- **Distribusi Kekayaan:** Dalam kapitalisme, distribusi kekayaan tidak terhindarkan, dan kesenjangan antar kelas sosial dapat terjadi. Ini dapat merangsang motivasi dan inovasi, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Sebaliknya, sosialisme berusaha mengurangi kesenjangan pendapatan dengan cara mengendalikan kepemilikan dan distribusi kekayaan melalui peran aktif pemerintah.
- **Kebebasan Individu:** Kapitalisme menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama, memberikan hak kepada individu untuk memiliki, membeli, dan menjual barang dan jasa sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka. Sosialisme, sementara itu, dapat membatasi kebebasan individu dalam mengelola sumber daya dan kekayaan pribadi guna mencapai keadilan sosial.
- **Efisiensi dan Inovasi:** Kapitalisme dikenal karena memotivasi efisiensi ekonomi dan inovasi. Persaingan antar perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar mendorong peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Di sisi lain, sosialisme mungkin menghadapi tantangan dalam memotivasi inovasi karena kurangnya insentif finansial secara langsung untuk individu dan perusahaan.

2. Kapitalisme vs. Ekonomi Campuran:

- **Peran Pemerintah:** Dalam sistem kapitalis, peran pemerintah lebih terbatas dan fokus pada memastikan perlindungan hak milik, menegakkan hukum, dan mengatur pasar agar beroperasi secara adil. Ekonomi campuran mencakup campur tangan pemerintah yang lebih besar dalam mengatur ekonomi. Pemerintah dapat mengambil peran aktif dalam menyediakan layanan sosial, mengendalikan monopoli, dan menyeimbangkan distribusi pendapatan melalui pajak dan kebijakan sosial.
- **Kebebasan Pasar:** Kapitalisme menekankan kebebasan pasar dan mekanisme pasar yang tidak terhalang. Dalam lingkungan ini, persaingan di antara perusahaan dianggap sebagai pendorong utama efisiensi dan inovasi. Di sisi lain, ekonomi campuran menyelaraskan kebebasan pasar dengan tanggung jawab sosial. Pemerintah terlibat dalam mengendalikan aspek-aspek tertentu dari ekonomi untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan dan kesejahteraan sosial.
- **Distribusi Pendapatan:** Kapitalisme cenderung menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan karena persaingan pasar yang intens. Ekonomi campuran, sementara tetap memungkinkan ketidaksetaraan, dapat menggunakan pajak progresif dan kebijakan redistribusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan sosial.
- **Tujuan Ekonomi:** Kapitalisme memiliki tujuan utama mencapai keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ekonomi campuran menggabungkan tujuan keuntungan dengan kepentingan kesejahteraan sosial. Pemerintah berperan dalam mencapai tujuan ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan.

- **Perlindungan Konsumen dan Lingkungan:** Kapitalisme umumnya lebih fokus pada kebebasan konsumen dan kurangnya regulasi pasar. Ekonomi campuran menempatkan penekanan khusus pada perlindungan konsumen dan lingkungan melalui regulasi pemerintah yang lebih aktif dan kontrol terhadap praktik bisnis.



BAB 7

Ekonomi Pancasila

7.1 Pilar Perwujudan Ekonomi Pancasila

Pilar perwujudan ekonomi pancasila mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi yang diilhami oleh ajaran Pancasila. Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Prinsip ini berusaha mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang besar antara kelompok-kelompok masyarakat. Pancasila mendukung kepemilikan yang adil dan merata, baik dalam hal sumber daya alam maupun peluang ekonomi. Prinsip ini menolak monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan kepentingan bersama (Agusalim et al., 2018).

Masyarakat diharapkan ikut serta secara aktif dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi ini dapat terwujud melalui mekanisme demokratis dan partisipatif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ekonomi Pancasila menegaskan perlunya keadilan sosial dalam distribusi hasil ekonomi. Kesejahteraan sosial diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga

dari sejauh mana hasil ekonomi tersebut memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Prinsip gotong-royong dan solidaritas masyarakat sangat ditekankan dalam ekonomi Pancasila. Kerjasama dan tolong-menolong antar anggota masyarakat menjadi landasan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Ekonomi Pancasila harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Pengusaha, pelaku ekonomi, dan seluruh masyarakat diharapkan menjalankan kegiatan ekonomi dengan penuh tanggung jawab moral dan sosial. Konsep pembangunan ekonomi dalam bingkai Pancasila harus berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Keberlanjutan ekonomi harus memperhatikan kebutuhan generasi mendatang dan menjaga keseimbangan ekologis. Perwujudan ekonomi Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Implementasi pilar-pilar tersebut dapat terlihat dalam kebijakan ekonomi, regulasi, serta perilaku dan budaya ekonomi di masyarakat (Adha & Susanto, 2020).

7.2 Corak Ekonomi Pancasila

Corak ekonomi Pancasila mencakup pola atau karakteristik ekonomi yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa ciri atau corak ekonomi yang dapat diidentifikasi dalam konteks ekonomi Pancasila, antara lain: (Tjakrawerdaja et al., 2017).

1. Keseimbangan Pembangunan

Mendorong pembangunan ekonomi yang seimbang antara sektor-sektor ekonomi dan wilayah-wilayah geografis untuk menghindari ketidaksetaraan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan, sehingga dapat merasakan manfaat secara langsung.

3. **Kepemilikan yang Merata**
Mendorong kepemilikan yang merata atas sumber daya ekonomi, termasuk tanah, modal, dan peluang usaha.
4. **Partisipasi Demokratis**
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang dapat tercermin dalam mekanisme demokratis dan partisipatif.
5. **Distribusi Keadilan Sosial**
Memastikan distribusi hasil ekonomi secara adil untuk mencapai keadilan sosial, termasuk perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lebih lemah.
6. **Gotong Royong dan Solidaritas**
Mendorong semangat gotong royong dan solidaritas dalam kegiatan ekonomi, di mana masyarakat saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.
7. **Pembangunan Berkelanjutan**
Memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi masa depan juga dapat terpenuhi.
8. **Moral dan Etika**
Ekonomi Pancasila harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, mencakup integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
9. **Pencapaian Kesejahteraan**
Tujuan utama ekonomi Pancasila adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang semata.

7.3 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila

Konsep operasionalisasi ekonomi Pancasila mencakup langkah-langkah atau strategi konkret yang diambil untuk

mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam Pancasila (Agussalim, 2019).

7.3.1 Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Beberapa langkah konkret yang dapat diambil dalam konteks kebijakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam perumusan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, membentuk tim atau lembaga khusus yang bertugas merumuskan kebijakan ekonomi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila. Memastikan bahwa setiap kebijakan yang diusulkan atau diimplementasikan mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat. Infrastruktural yang merata dengan menetapkan kebijakan untuk mengembangkan infrastruktur di seluruh wilayah negara secara merata, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Memastikan bahwa infrastruktur mendukung aksesibilitas dan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Dengan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil menengah yaitu dapat mengembangkan kebijakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses terhadap kredit, dan pembentukan koperasi. Memberikan insentif dan dukungan khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar dapat berperan aktif dalam perekonomian. Dalam kebijakan kesejahteraan sosial, menetapkan kebijakan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti kaum miskin, lansia, dan difabel. Membangun sistem jaminan sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam konteks pola distribusi yang adil dapat menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta menerapkan insentif untuk praktik

ekonomi yang ramah lingkungan. Selain itu, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks ekonomi dan memasukkan materi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi melalui konsultasi, musyawarah, atau mekanisme partisipasi lainnya.

7.3.2 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila Sila Pertama

Sila pertama dalam Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Operasionalisasi ekonomi Pancasila dengan merujuk pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat mencakup beberapa aspek berikut:

1. Pengakuan Keberadaan Tuhan

Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam tatanan ekonomi dengan mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan etika dalam kegiatan ekonomi.

2. Etika Bisnis Berbasis Agama

Mengembangkan etika bisnis yang mencerminkan nilai-nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

3. Pemberdayaan Umat Beragama

Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemberdayaan umat beragama dalam kegiatan ekonomi, termasuk memberikan ruang bagi praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

4. Keberagaman dan Toleransi

Mendorong keberagaman dalam kegiatan ekonomi dan memastikan adanya toleransi terhadap perbedaan keyakinan dalam lingkungan bisnis.

5. **Sosialisasi Nilai-Nilai Keagamaan**
Melibatkan lembaga keagamaan dalam menyosialisasikan nilai-nilai keagamaan yang dapat membimbing praktik ekonomi.
6. **Penggunaan Dana Zakat dan Infak**
Mengembangkan program atau kebijakan yang mengatur penggunaan dana zakat dan infak untuk tujuan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. **Kebijakan yang Mempertimbangkan Nilai-Nilai Agama**
Menyusun kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan dan mengakomodasi nilai-nilai agama dalam konteks regulasi dan praktik bisnis.
8. **Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia**
Menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konteks keagamaan, termasuk hak beribadah dan kebebasan berkeyakinan.
9. **Kerjasama Lintas Agama**
Mendorong kerjasama ekonomi lintas agama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan saling menghormati.
10. **Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan**
Menggandeng pemangku kepentingan agama dalam mengembangkan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan nilai-nilai keagamaan.

7.3.3 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila Sila Kedua

Tabel 1.1 Tabel operasionalisasi ekonomi Pancasila dengan merujuk pada Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Aspek Operasionalisasi	Penjelasan
Pendidikan dan Pelatihan	Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.
Kesehatan dan Pelayanan Sosial	Menerapkan kebijakan kesehatan dan pelayanan sosial yang merata untuk memastikan akses layanan kesehatan dan sosial.
Ketenagakerjaan	Menetapkan kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi hak pekerja dan mengatasi isu-isu ketidaksetaraan di tempat kerja.
Hak Asasi Manusia	Memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ketenagakerjaan dan kegiatan ekonomi lainnya.
Kesetaraan Gender	Mendorong kesetaraan gender dalam peluang pekerjaan, upah, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Perlindungan Konsumen	Menetapkan regulasi yang kuat untuk melindungi hak konsumen dan menghindari praktik bisnis yang merugikan masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat	Mengembangkan kebijakan distribusi ekonomi yang adil dan

	merata untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Kesadaran Lingkungan	Mendorong kesadaran lingkungan dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi.
Keadilan Sosial	Mengutamakan kebijakan dan langkah-langkah yang berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.

7.3.4 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila Sila Ketiga

Operasionalisasi ekonomi Pancasila dengan merujuk pada Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” melibatkan sejumlah langkah konkret dalam rangka mencapai tujuan persatuan dan kesatuan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut aspek operasionalisasinya, antara lain:

1. Pengembangan Koperasi
 - Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi sebagai bentuk usaha bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - Koperasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antar anggota masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi.
2. Investasi dalam Pengembangan Wilayah
 - Mengalokasikan investasi secara merata untuk pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan antar daerah.
 - Fokus pada proyek-proyek infrastruktur dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi berbagai wilayah.

3. Pelibatan Daerah Otonom
 - Melibatkan pemerintah daerah otonom dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi.
 - Memastikan kebijakan yang diambil dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi ekonomi masing-masing daerah.
4. Pembangunan Infrastruktur
 - Menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah.
 - Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan transportasi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
5. Program Pertanian dan Nelayan
 - Mengimplementasikan program pertanian dan perikanan yang berfokus pada peningkatan produktivitas.
 - Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah.
6. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan
 - Menjamin pemerataan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.
 - Pendidikan dan kesehatan yang merata mendukung perkembangan sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas ekonomi.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat
 - Mendorong program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan bagi inisiatif lokal.
 - Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

8. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil untuk mencegah eksploitasi yang merugikan daerah tertentu.

Melalui langkah-langkah tersebut, operasionalisasi ekonomi Pancasila pada Sila Ketiga diharapkan dapat menciptakan kesatuan dan persatuan dalam pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

7.3.5 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila Sila Keempat

Operasionalisasi ekonomi Pancasila dengan merujuk pada Sila Keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, melibatkan sejumlah langkah konkret yang berfokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam musyawarah dan perwakilan dapat mendorong praktik musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Memastikan partisipasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah ekonomi dan mekanisme perwakilan yang demokratis.

Dalam pendidikan ekonomi partisipatif, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dan mekanisme ekonomi melalui pendidikan ekonomi partisipatif. Menyelenggarakan pelatihan dan forum diskusi untuk meningkatkan kesadaran ekonomi masyarakat. Dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas, menerapkan kebijakan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya ekonomi. Menegakkan standar akuntabilitas untuk memastikan keputusan ekonomi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi sebagai bentuk partisipasi ekonomi masyarakat. Memberikan akses finansial, pelatihan, dan dukungan lainnya untuk penguatan UMKM dan koperasi (Saputra & Saoqillah, 2017).

7.3.6 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila Sila Kelima

Operasionalisasi ekonomi Pancasila dengan merujuk pada Sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, melibatkan serangkaian langkah untuk mencapai keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Beberapa aspek operasionalisasi tersebut, antara lain:

1. Kebijakan Distribusi Kekayaan
Menetapkan kebijakan distribusi kekayaan yang adil dan merata, mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu dan kelompok masyarakat.
2. Keadilan dalam Akses Pendidikan dan Kesehatan
Menjamin akses yang merata terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Menerapkan kebijakan untuk mengatasi disparitas pendidikan dan kesehatan antar daerah dan antar kelompok.
3. Perlindungan Pekerja dan Hak Buruh
Menetapkan undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kondisi kerja yang aman dan adil. Menerapkan kebijakan upah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.
4. Perumusan dan Implementasi Kebijakan Redistribusi
Menyusun kebijakan redistribusi sumber daya ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antar individu dan kelompok. Menerapkan program dan insentif yang mendukung masyarakat kurang mampu.
5. pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal
mengembangkan ekonomi masyarakat lokal melalui program-program yang memberdayakan potensi ekonomi setempat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal.



Kesimpulan

SECARA keseluruhan, sistem ekonomi Indonesia terus menghadapi berbagai dinamika dan perubahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Buku ini menggarisbawahi bahwa sistem ekonomi Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi yang efektif. Buku ini menyoroti beberapa aspek utama, seperti pertumbuhan sektor UMKM, kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengaturan sumber daya alam, penguatan sektor pertanian dan pedesaan, serta upaya pemerataan pembangunan wilayah. Namun, dalam implementasinya, terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran, kesenjangan infrastruktur, ketergantungan pada sektor tertentu, dan tantangan lingkungan.

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan investasi dalam infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, pendekatan kebijakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan dan perubahan iklim, serta upaya nyata dalam mengurangi

ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor tertentu. Kesimpulannya, buku ini menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dan perencanaan yang matang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 121–138. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>
- Agusalim, L., Karim, M., & Saefuddin, A. (2018). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1(01), 39–53. <https://doi.org/10.31326/jks.v1i01.138>
- Agussalim. (2019). Ekonomi Pancasila Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ekonomi. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 2(2), 20–32.
- Aristawati, S. B., & Hartati, S. (2022). Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila. *JEB17 : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(02), 97–110. <https://doi.org/10.30996/JEB17.V7I02.7360>
- Arsyad, L. (2018). *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*.
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>

- Becker, G. S., Grossman, M., & Michael, R. T. (2017). Economic theory. *Economic Theory*, 1–224. doi.org/10.4324/9781351327688/ECONOMIC-THEORY-GARY-BECKER
- Blanpain, R., & Colucci, M. (2004). *The Globalization of Labour Standards: The Soft Law Track*. Kluwer Law International.
- C. M. Sapioper, H., Ilham, I., Kadir, A., Yumame, J., Sriyono, S., Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Patmasari, E. (2022). Emas Merah Paniai : Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 116–126. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7860>
- Constantino, R. (2018). Towards a Theory of Planned Economy. *Towards a Theory of Planned Economy*. <https://doi.org/10.4324/9781138019270>
- Dalimunthe, J. W., Arif, M., Islam, J. E., Ekonomi, F., & Islam, B. (2022). Peran Dinas Koperasi dan UKM Dalam Meningkatkan UMKM di Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 279–287. <https://doi.org/10.47467/VISA.V2I2.1236>
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*. Pearson Education Limited.
- Dwijowijoto, R. N., & Wrihatnolo, R. R. (2008). *Manajemen Privatisasi BUMN*. Elex Media Komputindo.
- Fachrizi, Ach. R., Luaylik, N. F., & Imam, A. (2023). Community Empowerment through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at the Department of Industry and Trade Cooperatives in Sampang District, Sampang Regency. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(07). <https://doi.org/10.47191/IJSSHR/V6-I7-46>
- Fikriman, F. (2017). Tranformasi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/jas.v1i2.151>

- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
- Gao, Y., Huang, Z., & Liang, Q. (2018). Service Realization And Determinants In Agricultural Cooperatives In China: Evidence From Zhejiang, Sichuan And Heilongjiang Provinces. *The Singapore Economic Review*, 63(5), 1205–1225. <https://doi.org/10.1142/S0217590815501143>
- Gedeon, H. T. W. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 9(2), 47–60. <https://doi.org/10.31845/JWK.V9I2.438>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.vii2.4778>
- Haddad, C., & Hornuf, L. (2019). The emergence of the global fintech market: economic and technological determinants. *Small Business Economics*, 53(1), 81–105. <https://doi.org/10.1007/S11187-018-9991-X/TABLES/8>
- Hariance, R., Noer, M., Ridwan, E., & Hasnah, H. (2021). Build a strong agribusiness institution through collective action. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 741(1), 012078. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/741/1/012078>
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*.
- Hasan, R. Y., & Ardi, I. K. (2020). Resilience Kinship Principle in Cooperatives Quo the Pillar of the Indonesian Economy. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*, 235–247. <https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.200321.032>

- Idhil K, M. R. (2013). *Analisis Tingkat Kesehatan BUMN terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan BUMN Sektor Energi, Aneka Industri, Pertambangan, Dan Telekomunikasi Di Indonesia*. Universitas Hassanuddin.
- Jackson, T. (2009). *Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet*. Earthscan.
- Jamil Farhas, R., & Riyanti, R. (2022). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2).
- Kacaya Mita, F., Fikrman, & Setiono. (2021). The Role of Cooperatives as a Source of Facilitators in the World of Agriculture (Review Article). *Baselang*, 1(2), 92–98. <https://doi.org/10.36355/BSL.V1I2.19>
- Kharisma, D., & Kusumastuti, S. Y. (2022). Dampak Perubahan Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kinerja Keuangan BUMN Sektor Energi. *Media Ekonomi*, 30(2).
- Kurniawan, D. (2010). *Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi*.
- Kurniawan, I. D., & Lahir, S. (2017). Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(02), 84–99. <https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.153>
- Lundvall, B.-Å. (2016). *The Learning economy and The economics of hope*. Anthem Press,.
- Meilina, R. Y., & Oktavian, R. (2022). Strategi Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan melalui Agenda Tahun Ekonomi Kreatif Internasional. *Jurnal Independen*. <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Micklethwait, J., & Wooldridge, A. (2003). *The Company: A Short History of a Revolutionary Idea*. Modern Library.
- Milonakis, D., & Fine, B. (2008). From political economy to economics: Method, the social and the historical in the evolution of economic theory. *From Political Economy to*

Economics: Method, the Social and the Historical in the Evolution of Economic Theory, 1–374. <https://doi.org/10.4324/9780203887110>

- Nafisah, R., Purnamasari, P., & Maemunah, M. (2019). *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Tingkat Religiusitas terhadap Keinginan untuk Melakukan Whistleblowing (Studi pada Empat Badan Usaha Milik Negara Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Bandung)*.
- Nikolić, M., Božić, I., & Božić, D. (2021). Cooperative principles in practice: Experiences of Serbia. *Western Balkan Journal of Agricultural Economics and Rural Development*, 3(2), 97–110. <https://doi.org/10.5937/WBJAE2102097N>
- Nugroho, W. (2014). Konsistensi Negara Atas Doktrin Welfare State Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Oleh Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(2), 22–49. <https://doi.org/10.38011/jhli.vii2.14>
- Pandjaitan, L. B. (2015). *Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia*.
- Polanyi, K. (2018). The Economy as Instituted Process. *The Sociology of Economic Life*, 3–21. <https://doi.org/10.4324/9780429494338-2>
- Puja Pangestu, F., Shelvia Rahmadiani, N., Tanzila Hardiyanti, N., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 210–219.
- Putri, R., Situmorang, J. W., Junaidi, A. junaidi, Hutomo, A. S., Sutoto, A. S., Hidayat, S. H., Wisudayati, T. A., Astuty, E. D., Hidayat, D. C., & Suprpto, S. S. (2023). Level of the Cooperative Principles Implementationıprototype Model of Mapping Indonesian Cooperatives as Social Corporations. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.4390392>

- Rahadian, A. H. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI, III*(01).
- Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 71-81. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art7>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R., & Clerkin, R. (2008). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education.
- Sachs, J. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Press.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. (2010). *Economics* (Nineteenth Edition). McGraw-Hill.
- Saputra, I., & Saoqillah, A. (2017). Koperasi sebagai soko guru penggerak ekonomi pancasila. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2(2), 139-146. <https://doi.org/10.1017/cb09780511492488.009>
- Siregar, H. A. (2020). The Legal Role in Developing Indonesian Cooperative Business in National Economy Through Partnership in Facing Global Era for Improving Community Welfare. *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD)*, 275-278. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.201017.060>
- Siwu, H. F. D. (2018). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*.
- Stiglitz, J. E. (2010). *Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy*. W. W. Norton & Company.
- Styaningrum, F. (2021a). Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 565. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.io8.p01>

- Styaningrum, F. (2021b). Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 565. <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.io8.p01>
- Syafiâ, M. (2016). Sistemiknya Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 63–90.
- Tjakrawerdaja, S., Soedarno, S., Lenggono, P. S., Purwandaya, B., Karim, M., & Agusalim, L. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Rajawali Press.
- Trotman-Dickenson, D. I. (2014). *Public Sector Economics: Made Simple*. Elsevier Science.
- Utama, A. S. (2018). Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 1–21.
- Wibowo, E. (2008). Perencanaan Dan Strategi Pembangunan Di Indonesia. In *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* (Vol. 8, Issue 1).
- Widodo, T. (2006). From Dutch Mercantilism to Liberalism: Indonesian Historical Perspective. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 21(4), 323–343.
- Yuliani, F. (2019). Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Sawit Rakyat Pada Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.33-40>
- Yunus, H., Farida, N., Astuti, R., Wijayanto, A., Kismartini, K., & Rakasiwi, G. (2021). *Collaboration Strengthening among Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Central Java during Covid-19*. <https://doi.org/10.4108/EAI.9-10-2020.2304786>

Biodata Penulis



Iskandar, M.Si.

Dosen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Iskandar, M.Si, biasa memakai nama Iskandar Chang, Aktivist Muslim keturunan Tionghoa, Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Jawa Tengah, adalah Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Salatiga sejak tahun 2016. Menjadi santri kalong di beberapa Pondok Pesantren seperti Pondok Pesantren Annida Salatiga, Pondok Pesantren An - Nuur Pakis Magelang, Pondok Pesantren Amsilati Jepara. Pendidikan S1 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Salatiga Jurusan PAI,

S2 diselesaikan di Program studi Ekonomi Pembangunan UKSW Salatiga pada tahun 2001, melanjutkan Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang sejak tahun 2018, saat ini sedang menyelesaikan Disertasi S3.

Selain mengajar di UIN Salatiga, penulis aktif di berbagai organisasi sosial keagamaan dan bisnis. Mengelola Pondok Pesantren Mahasiswa Mutiara Hati Beriman Salatiga. Aktif dalam berbagai seminar regional, nasional dan Internasional dalam bidang ilmu ekonomi, politik dan pariwisata. Saat ini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (CESDEP) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pernah menjadi Kontributor Kompas TV pada acara Kalam Hati untuk beberapa Episode. Saat Ini diamanahi sebagai Kepala Pusat Halal Center UIN Salatiga (2023- Sekarang), Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jateng (2021-2025), Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Komisariat IAIN Salatiga (2021-2025), Ketua 1 Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Jawa Tengah (2020-2023), Ketua 1 Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Salatiga (2020-2023), Wabendum. Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) (2021-2024), Direktur Sinergi Lintas Sukses, Lembaga Pelatihan Pemberdayaan, pengembangan dan Spiritualitas, Dewan Pakar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Salatiga (2020-2024). Karya Ilmiah Buku pada saat ini Pertumbuhan Ekonomi dalam Analisis Moneter (2021); Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia (Book Chapter, 2022); Ekonomi Pembangunan (2023) dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif.

Email Penulis: iskandarchang@uinsalatiga.ac.id



Heppi Syofya, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

Penulis lahir di Desa Gedang tanggal 29 Maret 1988. Penulis adalah dosen pada Program Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, Padang dan melanjutkan S2 pada Program Studi Perencanaan Pembangunan, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.

Penulis aktif melakukan penelitian ekonomi pembangunan khususnya dibidang *Agroforestry and sustainable agriculture practi* yang dipublikasi pada jurnal nasional ataupun internasional, selain itu penulis juga terlibat aktif dibidang pengabdian masyarakat yang berlandaskan pada tujuan dari SDGs.



Annisa Febryanti, S.IP.

Annisa Febryanti lahir di Kota Malang pada tanggal 28 Februari 2000. Semasa di Malang pernah mengenyam Pendidikan di SD Negeri Percobaan 2 Malang, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 4 Malang, dan melanjutkan SMA di SMA Laboratorium UM Kota Malang. Kemudian melanjutkan Pendidikan tinggi Strata 1 (S1) dengan mengambil jurusan Ilmu Perpustakaan di Universitas Negeri Malang. Saat ini aktif berkegiatan menjadi bagian dari tim naskah dari PT. Samudera Meda Nusantara. Email: annisafebry2@gmail.com